

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu umum (Pemilu) menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 telah berlangsung secara fenomenal. Hanya dua pasang calon presiden yang bertarung dalam pemilihan presiden di Indonesia, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-HR) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merupakan fenomena yang pertama di Indonesia. Dua pasang calon ini bersaing secara ketat dalam kampanye dan di dalam perhitungan suara.¹ Sepintas Prabowo-HR terlihat menggunakan strategi kontruksi sosial pencitraan kelompok kelas menengah atas, dengan menampilkan gaya bicara seperti Bung Karno, menggunakan baju dengan model dan warna kelas menengah di zaman Bung Karno, yaitu semi jaz warna putih susu. Adapun Jokowi-JK sepintas terlihat menggunakan strategi kontruksi sosial pencitraan kelompok kelas bawah, yaitu dekat dengan rakyat melalui

¹ Burhan Bungin. Komunikasi Politik Pencitraan The Social Construction of Public Administration (SocPA). Prenadamedia Group. Jakarta. 2018

“blusukan”, menyebarkan gambar-gambar Jokowi sebagai tukang becak, tukang tambal ban, petani di sawah, dan lain sebagainya. Gaya berpakaian Jokowi-JK juga mencitrakan pakaian orang biasa, yaitu kemeja putih tanpa dimasukan celana.

Selain kontruksi sosial pencitraan melalui sosok penampilan, strategi kontruksi sosial pencitraan yang lain dengan menyerang tokoh lawan dengan pencitraan buruk, seperti saling menyebar aib. Seperti dari kelompok Jokowi-JK membangun dan menyebar citra buruk Prabowo-HR sebagai Jenderal buruk, dipecat dari instansinya karena tindakan makar, sementara itu terkesan juga ada strategi kontruksi sosial pencitraan dari kelompok Prabowo-HR yang mengkontruksi citra buruk Jokowi sebagai anak PKI, anak Cina, bukan muslim dan sebagainya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum tahun 2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Seperti tahun 2014 lalu, pada tahun 2019 ini pun sama hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka kembali berkontestasi politik pada pemilihan umum tahun 2019 ini hanya saja berbeda calon wakil presidennya.

Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 20 September 2018. Pemilu dilaksanakan secara serentak, maka penetapan calon juga dilakukan secara serentak. Penetapan itu berbarengan dengan penetapan calon legislatif (caleg) anggota DPR, DPRD dan DPD.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin diusung oleh Partai PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung merupakan bentuk usaha pemerintah demi berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 17 April 2019 diadakan Pemilihan Umum (PEMILU) serentak atau disebut juga sebuah pesta demokrasi besar, yaitu pemilihan umum untuk DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPRD-RI, DPD-RI serta Presiden dan Wakil Presiden. Di media masa maupun media online sedang ramai diperbincangkan terkait dukungan kepada kedua calon Presiden tersebut seperti berlomba-lomba untuk menunjukan bahwa pilihannya lah yang terbaik. Hal yang menarik ketika penulis amati yaitu adanya sebuah Deklarasi Jaringan Santri untuk Jokowi di Kota Tasikmalaya. Itu adalah bentuk nyata bahwa para kiai dan santri dari beberapa pesantren di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Tasikmalaya

mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi agar terpilih kembali dalam pemilihan umum tahun 2019.

Dalam skripsi ini saya akan membahas mengenai Deklarasi Jaringan Santri untuk Jokowi di Kota Tasikmalaya. Seperti kita ketahui bahwa Jokowi itu ketika pemilu tahun lalu disebut sebagai anak PKI, anak Cina dan bukan muslim. Tetapi pernyataan tersebut terbantahkan dengan Jokowi memilih KH. Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi sebagai calon presiden Indonesia pada pemilihan presiden yang digelar pada tahun 2019, yang terkenal sebagai ulama besar yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga Ketua PBNU. Selain sebagai ulama beliau juga merupakan seorang politisi yang pernah menjabat sebagai Anggota MPR dan Ketua Komisi VI DPR RI mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sehingga banyak dari kalangan kiai maupun santri di berbagai daerah di Indonesia yang mendukung Jokowi untuk dua periode. Begitupun di Kota Tasikmalaya, pada waktu lalu di Pondok Pesantren Al-Hikmah dan di Pondok Pesantren Sulalatul Huda mengadakan Deklarasi Jaringan Santri untuk Jokowi.

Pemilu serentak 2019 telah selesai dilaksanakan, terlepas dari apapun hasil dan siapa pemenangnya, sistem yang dilakukan telah mengarah kepada politik mobilisasi daripada demokratisasi itu sendiri. Mobilisasi secara sederhana selalu dilawankan dengan partisipasi. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga

mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.²

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan, juga sering dijadikan sebagai komoditas politik oleh politikus yang berkepentingan sehingga sering dijumpai ketika musim kampanye para kandidat dan tim suksesnya mendatangi pondok pesantren dengan berbagai modus. Namun pada hakikatnya kandidat tersebut sebenarnya meminta restu kepada kiai-kiai sekaligus meminta dukungan spiritual dan dukungan massa.³

Untuk mendapat dukungan masa yang lebih banyak, pada setiap pemilihan umum (Pemilu) maka suara kiai dan santri selalu diperebutkan bukan oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dikalangan Islam yang menjadi pengikut setia kiai, banyak partai politik yang menempatkan kiai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi magnet dalam pemilu. Kecenderungan menarik dukungan kiai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahwa nilai politik kiai di hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi.⁴

² Wikipedia

³ Inong. *Pembelajaran Politik Dikalangan Santriwati Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta. Skripsi pada Jurusan Jinayah Syiasah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. (Yogyakarta, 2010).

⁴ Op. cit

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk mempermudah arah proses pembahasan dalam penyusunan skripsi, penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan penjelasan tentang Mobilisasi Jaringan Santri untuk Jokowi dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya, yang berkaitan dengan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana Mobilisasi Jaringan Santri untuk Jokowi dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang ada pada penelitian ini agar lebih terfokus dan terarah pada saat melakukan penelitian dan agar pembahasan serta analisis tetap tertuju dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ada dan perlu adanya batasan yang harus difokuskan pada fenomena tertentu yang penting untuk diperdalam analisisnya dalam pembahasan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang Mobilisasi Jaringan Santri untuk Jokowi dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Mobilisasi Jaringan Santri untuk Jokowi dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Untuk mengetahui Mobilisasi Jaringan Santri untuk Jokowi dalam

Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik, khususnya pada Mobilisasi Jaringan Santri untuk Jokowi dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memperjelas tentang komunikasi politik dalam pembangunan perpolitikan di Indonesia dan dapat memberikan gambaran mengenai Mobilisasi Jaringan Santri untuk Jokowi dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.
- b. Hasil penelitian ini nantinya juga di harapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.